

## KONFLIK ETNO RELIGIUS DI MYANMAR: KEKERASAN DAN PENGUASAAN MASAL TERHADAP KOMUNITAS ROHINGYA

**Khofifah Sekar Ningrum**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[khofifahsn1@gmail.com](mailto:khofifahsn1@gmail.com)

### **Abstract**

*Ethnoreligious conflict in Myanmar, focusing on the violence and oppression experienced by the Rohingya community. The conflict involves multiple factors such as ethnic, religious, and political tensions that have led to a serious humanitarian crisis. This article explains the dynamics of the conflict, including the role of the Myanmar government, military, and extremist groups in curbing the rights and security of the Rohingya people. It also highlights the international response and human rights defence efforts in addressing the situation. Taking into account Myanmar's historical context and political dynamics, the research aims to understand the root causes of the conflict and seek sustainable solutions for peace and justice for the Rohingya community.*

**Keywords:** Conflict, Violence, Rohingya

### **Abstrak**

Konflik etnoreligius di Myanmar, dengan fokus pada kekerasan dan penindasan yang dialami oleh komunitas Rohingya. Konflik ini melibatkan berbagai faktor seperti ketegangan etnis, agama, dan politik yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius. Artikel ini menjelaskan dinamika konflik, termasuk peran pemerintah Myanmar, militer, dan kelompok-kelompok ekstremis dalam mengekang hak-hak dan keamanan warga Rohingya. Penelitian juga menyoroti tanggapan internasional dan upaya pembelaan hak asasi manusia dalam menangani situasi ini. Dengan memperhatikan konteks sejarah dan dinamika politik Myanmar, penelitian ini bertujuan untuk memahami akar penyebab konflik dan mencari solusi yang berkelanjutan untuk perdamaian dan keadilan bagi komunitas Rohingya.

**Kata kunci:** Konflik, Kekerasan, Rohingya.

### **Pendahuluan**

Konflik etno-religius di Myanmar, khususnya terhadap komunitas Rohingya, telah menjadi isu yang sangat sensitif dan kompleks. Komunitas Rohingya, yang terdiri dari etno-religius minoritas, telah mengalami kekerasan dan penguasaan masal oleh pemerintah Myanmar dan masyarakat setempat. Keterbelakangan dan Diskriminasi pada Komunitas Rohingya telah mengalami diskriminasi dan keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak sipil. Keterbelakangan ini telah memperparah situasi mereka dan meningkatkan ketegangan dengan masyarakat setempat. Kekerasan dan Penguasaan Masal pada Pemerintah Myanmar telah melakukan kekerasan dan penguasaan masal terhadap

komunitas Rohingya, termasuk pengusiran, penahanan, dan pembunuhan (Sodiqin 2016).

Kekerasan ini telah memaksa ribuan orang Rohingya untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga, seperti Bangladesh, dan meningkatkan situasi kemanusiaan yang sangat sulit, adapun Keterlibatan Politik, pada Konflik etno-religius di Myanmar juga terkait dengan politik. Pemerintah Myanmar telah menggunakan kekerasan dan diskriminasi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menguasai wilayah. Komunitas Rohingya, yang memiliki kepentingan politik sendiri, telah menjadi korban dari kebijakan-kebijakan (Adnan 2020). Keterlibatan Agama juga memainkan peran penting dalam konflik ini. Komunitas Rohingya adalah Muslim, sedangkan pemerintah Myanmar adalah Kristen.

Perbedaan agama ini telah meningkatkan ketegangan dan konflik antara kedua belah pihak. Keterlibatan Internasional pada Konflik etno-religius di Myanmar juga telah menarik perhatian internasional. Organisasi-organisasi hak asasi manusia dan organisasi internasional telah mengkritik pemerintah Myanmar atas kekerasan dan diskriminasi terhadap komunitas Rohingya. Namun, upaya-upaya internasional untuk menyelesaikan konflik ini masih terbatas. Dalam sintesis, konflik etno-religius di Myanmar terhadap komunitas Rohingya adalah hasil dari kombinasi faktor-faktor seperti keterbelakangan, diskriminasi, kekerasan, politik, agama, dan keterlibatan internasional. Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan upaya-upaya yang lebih efektif dan terkoordinasi untuk menghentikan kekerasan, memperbaiki situasi kemanusiaan, dan meningkatkan dialog antara pemerintah Myanmar dan komunitas Rohingya (Lukum 2021).

Konflik etnoreligius di Myanmar, khususnya yang melibatkan komunitas Rohingya, telah menjadi sorotan internasional karena tingkat kekerasan dan penindasannya. Rohingya adalah kelompok minoritas Muslim yang mayoritas tinggal di negara bagian Rakhine di barat laut Myanmar. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan faktor etnis, tetapi juga memiliki dimensi agama, politik, dan sosial yang kompleks. Ketegangan antara Rohingya dan pemerintah Myanmar telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan sejarah penindasan yang panjang terhadap kelompok ini. Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara dan telah menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap mereka, termasuk pembatasan hak-hak dasar seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kebebasan bergerak.

Konflik semakin diperburuk oleh kehadiran kelompok-kelompok ekstremis Buddhis yang secara terbuka memprovokasi kekerasan terhadap Rohingya. Selain itu, militer Myanmar juga telah terlibat dalam operasi keamanan yang kejam terhadap Rohingya, termasuk pembakaran desa, pemerkosaan, dan pembunuhan massal, yang menyebabkan puluhan ribu orang terpaksa melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh. Tanggapan internasional terhadap konflik ini telah bervariasi, dengan beberapa negara dan organisasi internasional mengecam kekerasan terhadap

Rohingya dan mendesak Myanmar untuk mengakhiri penindasan terhadap mereka. Namun, upaya penyelesaian konflik masih menemui tantangan besar karena ketidakkonsistenan dalam respons internasional dan ketidakmampuan pemerintah Myanmar untuk mengakui hak-hak dasar warga Rohingya.

Secara keseluruhan, sifat konflik etno-religius di Myanmar lebih bersifat destruktif daripada konstruktif. Dampak negatif dari kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis kemanusiaan jauh melebihi dampak positif yang mungkin muncul dari upaya untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan kesadaran internasional. Upaya berkelanjutan dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan dan mencapai perdamaian serta keadilan bagi semua kelompok yang terlibat.

Bentuk konflik etno-religius di Myanmar sangat kompleks dan mencakup berbagai jenis kekerasan dan diskriminasi sistematis terhadap Rohingya. Yang menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam dan memerlukan perhatian serta tindakan serius dari komunitas internasional untuk mencapai solusi yang adil dan damai. Konflik ini diperparah oleh politisasi agama, diskriminasi etnis, keragaman etnis dan agama, sejarah konflik, serta dukungan ekonomi dari negara lain seperti China (Bagensa 2021).

Dampak positif yang muncul dari upaya untuk mengatasi konflik etno-religius di Myanmar, dampak negatifnya jauh lebih besar dan signifikan. Krisis kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan ketidakstabilan politik adalah beberapa dampak negatif utama yang harus dihadapi oleh masyarakat Myanmar dan komunitas internasional. Upaya bersama untuk menghentikan kekerasan dan mencapai perdamaian serta keadilan bagi semua kelompok etnis di Myanmar tetap menjadi prioritas yang mendesak.

Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012–2013 (Sandy Nur Ikfal Raharjo). Pada tahun 2012-2013, terjadi konflik komunal di Rakhine, Myanmar, di mana identitas agama antara minoritas Muslim dan mayoritas Buddha dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan. Penelitian tersebut berusaha menganalisis apakah perbedaan identitas agama tersebut benar-benar berperan sebagai faktor struktural atau akar penyebab konflik di Rakhine. Mengidentifikasi kebijakan diskriminatif yang berkepanjangan dan tingkat ekonomi yang rendah sebagai faktor struktural penyebab konflik. Untuk mengoptimalkan proses resolusi konflik, kajian ini menyarankan agar para pemangku kepentingan memberdayakan kelompok biksu moderat dalam mempromosikan dialog antaragama, melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator, serta menghapus semua kebijakan diskriminatif (Raharjo 2015).

Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar (Tri Joko). Tujuan pada tulisan ini adalah untuk menggambarkan konflik yang tidak seimbang antara etnis Rohingya dan Rakhine di Myanmar, serta menjelaskan penyebab dan pemicu konflik tersebut. Konflik antara kedua kelompok etnis ini telah berubah

menjadi kekerasan dan pembunuhan terhadap etnis Rohingya yang sering terjadi tanpa adanya keadilan. Situasi ini menyebabkan konflik antara etnis Rohingya dan Rakhine di Myanmar menjadi laten dan dapat meletus kapan saja, bahkan hanya karena pemicu yang sederhana (Raharjo 2015).

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dapat berupa metode kualitatif dan studi pustaka. Langkah Penelitian Identifikasi dan Penetapan Masalah, Definisikan ruang lingkup konflik dan masalah spesifik yang akan diteliti, seperti bentuk kekerasan dan strategi penguasaan terhadap komunitas Rohingya. Tinjauan Literatur, Tinjau literatur yang relevan tentang konflik etno-religius, sejarah Rohingya, kebijakan pemerintah Myanmar. Susun temuan dalam bentuk laporan penelitian yang mencakup analisis konflik, implikasi dari kekerasan dan penguasaan terhadap Rohingya, serta rekomendasi kebijakan. Dengan menggunakan teori dan metode ini, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang konflik etno-religius di Myanmar dan dampaknya terhadap komunitas Rohingya.

### **Pembahasan**

#### **1. Sejarah Konflik Myanmar: Konflik Etno-Religius dan Politik.**

Sejarah konflik Myanmar dapat ditelusuri kembali ke masa pemerintahan Inggris di Burma, yang sekarang dikenal sebagai Myanmar. Pada masa itu, terjadi migrasi besar-besaran ke negara tersebut dari India dan Bangladesh, yang kemudian menjadi sumber konflik. Setelah Burma merdeka pada tahun 1948, konflik etnis dan politik terus berlanjut. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi konflik. Keterbelakangan dan Diskriminasi pada Komunitas Rohingya, yang terdiri dari etno-religius minoritas, telah mengalami diskriminasi dan keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak sipil. Keterbelakangan ini telah memperparah situasi mereka dan meningkatkan ketegangan dengan masyarakat setempat.

Kekerasan dan Penguasaan Masal pada Pemerintah Myanmar telah melakukan kekerasan dan penguasaan masal terhadap komunitas Rohingya, termasuk pengusiran, penahanan, dan pembunuhan. Kekerasan ini telah memaksa ribuan orang Rohingya untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga, seperti Bangladesh, dan meningkatkan situasi kemanusiaan yang sangat sulit, adapun Keterlibatan Politik, Konflik etno-religius di Myanmar juga terkait dengan politik. Pemerintah Myanmar telah menggunakan kekerasan dan diskriminasi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menguasai wilayah. Komunitas Rohingya, yang memiliki kepentingan politik sendiri, telah menjadi korban dari kebijakan-kebijakan.

Keterlibatan Agama juga memainkan peran penting dalam konflik ini. Komunitas Rohingya adalah Muslim, sedangkan pemerintah Myanmar adalah Kristen.

Perbedaan agama ini telah meningkatkan ketegangan dan konflik antara kedua belah pihak. Keterlibatan Internasional. Konflik etno-religius di Myanmar juga telah menarik perhatian internasional. Organisasi-organisasi hak asasi manusia dan organisasi internasional telah mengkritik pemerintah Myanmar atas kekerasan dan diskriminasi terhadap komunitas Rohingya. Namun, upaya-upaya internasional untuk menyelesaikan konflik ini masih terbatas. Dalam sintesis, konflik etno-religius di Myanmar terhadap komunitas Rohingya adalah hasil dari kombinasi faktor-faktor seperti keterbelakangan, diskriminasi, kekerasan, politik, agama, dan keterlibatan internasional. Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan upaya-upaya yang lebih efektif dan terkoordinasi untuk menghentikan kekerasan, memperbaiki situasi kemanusiaan, dan meningkatkan dialog antara pemerintah Myanmar dan komunitas Rohingya.

**2. Teori konflik etno-religius di Myanmar dengan fokus pada kekerasan dan penguasaan massal terhadap komunitas Rohingya.**

Teori Kekerasan Struktural Johan Galtung, Mengusulkan bahwa kekerasan tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga struktural, di mana struktur sosial dan politik dapat menciptakan kondisi yang merugikan kelompok tertentu secara sistematis. Teori Hak Asasi Manusia, Menekankan pentingnya perlindungan hak-hak dasar individu dan komunitas, serta bagaimana pelanggaran hak asasi manusia dapat menyebabkan atau memperparah konflik. Metode Kualitatif, Studi Kasus Mendalam tentang konflik Rohingya dengan fokus pada sejarah, dinamika, dan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik. Analisis Data Sekunder, Menggunakan data dari laporan organisasi internasional, pemerintah, dan NGO yang telah mengumpulkan informasi tentang kekerasan dan penguasaan di Myanmar.

Teori Kekerasan Struktural Johan Galtung menyoroti bahwa kekerasan terhadap komunitas Rohingya tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga terwujud melalui struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Kebijakan diskriminatif, marginalisasi ekonomi, politisasi agama, dan propaganda kebencian semuanya berkontribusi pada kekerasan struktural yang dialami oleh Rohingya. Kekerasan langsung yang terlihat melalui operasi militer dan pengusiran massal adalah manifestasi dari kekerasan struktural yang lebih dalam dan sistematis. Memahami konflik melalui lensa kekerasan struktural memberikan wawasan tentang perlunya reformasi mendasar dalam struktur sosial dan politik untuk mencapai perdamaian dan keadilan bagi komunitas Rohingya.

**3. Profil Singkat Agama Islam di Myanmar:**

- a. Agama Islam di Myanmar diperkenalkan oleh pedagang Arab Muslim pada abad ke-9 Masehi.
- b. Pada awalnya, Islam menyebar secara signifikan di wilayah Myanmar, dengan jumlah umat Islam yang berlipat ganda di selatan hingga melebihi jumlah umat Buddha lokal.

- c. Umat Islam di Myanmar berasal dari berbagai negara, termasuk Persia, Turki, India, Cina, atau Malaysia.
- d. Agama Islam di Myanmar termasuk dalam agama minoritas, dengan persentase sekitar 4% dari jumlah penduduk di seluruh Myanmar.

**Profil Singkat Agama Buddha di Myanmar:**

- a. Agama Buddha di Myanmar telah ada sejak abad ke-11 Masehi, ketika Kekaisaran Burma Pertama didirikan oleh Raja Anorata.
- b. Agama Buddha di Myanmar dipengaruhi oleh budaya dan kebudayaan lokal, serta pengaruh dari India dan Cina.
- c. Agama Buddha di Myanmar memiliki peranan penting dalam budaya dan kebudayaan Myanmar, serta dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Myanmar.
- d. Agama Buddha di Myanmar juga memiliki peranan dalam konflik etnis di Myanmar, terutama dalam konflik antara penduduk asli Myanmar yang beragama Buddha dan etnis Rohingya yang beragama Islam.

Dalam konteks konflik, perbedaan agama antara umat Islam dan Buddha di Myanmar telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konflik. Konflik antara penduduk asli Myanmar yang beragama Buddha dan etnis Rohingya yang beragama Islam telah berlangsung sejak lama, dengan beberapa insiden kekerasan dan diskriminasi yang terjadi terhadap etnis Rohingya (Bagensa 2021).

**4. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik antara Muslim dan Buddha di Myanmar dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu seperti:**

- A. Perbedaan Etnis: Konflik ini terkait dengan perbedaan etnis antara Muslim Rohingya dan penduduk asli Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Identitas etnis yang berbeda ini mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan ajaran agama mereka, serta pandangan mereka terhadap konflik doktrin.
- B. Perbedaan Agama: Perbedaan ajaran antara Islam dan Buddha juga berperan dalam konflik ini. Islam memiliki doktrin yang bisa lebih inklusif terhadap agama lain, namun juga memiliki aspek eksklusif yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan ajaran agama. Sebaliknya, doktrin agama Buddha di Myanmar sering kali bersifat lebih eksklusif, yang juga mempengaruhi persepsi dan pelaksanaan ajaran agama di masyarakat.
- C. Perbedaan Politik: Konflik ini juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan politik. Etnis Rohingya memiliki aspirasi politik sendiri, seperti keinginan untuk mendirikan pemerintahan di negara bagian Rakhine. Aspirasi politik ini mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan ajaran agama mereka serta cara pandang mereka terhadap konflik doktrin.
- D. Perbedaan Sosial Budaya: Perbedaan dalam aspek sosial dan budaya antara kedua kelompok juga mempengaruhi konflik ini. Perbedaan ini berdampak pada pemahaman dan penerapan ajaran agama, serta cara pandang terhadap konflik doktrin di masyarakat.

- E. Perbedaan Ekonomi: Perbedaan kondisi ekonomi antara Muslim dan Buddha di Myanmar turut mempengaruhi konflik ini. Kondisi ekonomi yang berbeda ini mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan ajaran agama mereka serta cara pandang mereka terhadap konflik doktrin.

Secara keseluruhan, konflik antara Muslim dan Buddha di Myanmar dapat dikategorikan sebagai konflik yang disebabkan oleh perbedaan etnis, agama, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan ajaran agama mereka serta cara mereka memandang konflik doktrin.

#### 5. Peristiwa – Peristiwa Konflik Myanmar

- Kolonialisme Inggris (1824-1948).

Perang Anglo-Burma: Inggris melakukan tiga kali perang melawan kerajaan Burma pada abad ke-19, yang akhirnya menyebabkan seluruh wilayah Burma dianeksasi oleh Inggris.

Pemerintahan Kolonial: Inggris memperkenalkan administrasi kolonial yang memisahkan etnis Burma dari etnis minoritas lainnya, menciptakan ketegangan etnis yang masih berlangsung hingga kini.

- Kemerdekaan dan Konflik Etnis (1948-sekarang).

Kemerdekaan (1948): Setelah merdeka dari Inggris, Myanmar (dahulu Burma) mengalami ketegangan etnis dan politik yang segera meledak menjadi perang saudara. Etnis minoritas seperti Karen, Shan, dan Kachin menuntut otonomi atau kemerdekaan.

Pemerintahan Militer (1962-2011): Pada tahun 1962, militer mengambil alih kekuasaan dalam kudeta dan mendirikan rezim militer yang keras. Pemerintahan militer ini berusaha untuk memusatkan kekuasaan dan sering menggunakan kekerasan terhadap kelompok etnis yang menuntut hak-hak mereka.

- Krisis Rohingya (2012-sekarang)

Kekerasan 2012: Ketegangan antara umat Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya meledak menjadi kekerasan yang menyebabkan ribuan orang mengungsi.

- Operasi Militer 2017: Militer Myanmar melancarkan operasi besar-besaran terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine, yang menurut PBB dan banyak organisasi internasional merupakan bentuk pembersihan etnis. Lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

- Transisi Demokrasi dan Kudeta 2021.

Transisi Demokrasi (2011-2021): Pada tahun 2011, Myanmar mulai melakukan transisi menuju pemerintahan sipil yang lebih demokratis. Namun, militer tetap memiliki pengaruh besar.

Kudeta 2021: Pada 1 Februari 2021, militer melakukan kudeta dan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi serta anggota pemerintah lainnya. Kudeta ini memicu protes besar-besaran di seluruh negeri, yang dihadapi dengan kekerasan oleh militer.

- **Perlawanan dan Konflik Berkelanjutan (2021-sekarang)**  
Protes dan Penindasan: Setelah kudeta, rakyat Myanmar melakukan perlawanan dalam bentuk protes damai dan pemberontakan bersenjata. Militer merespons dengan penindasan brutal yang menyebabkan ribuan korban jiwa dan penahanan massal.
- **Konflik Etnis Berkelanjutan:** Kelompok-kelompok etnis bersenjata seperti Kachin, Karen, dan Arakan Army terus melakukan perlawanan terhadap militer Myanmar, memperparah situasi kemanusiaan di banyak wilayah negara tersebut.
- **Dampak Internasional**  
Krisis Pengungsi: Konflik berkepanjangan menyebabkan gelombang pengungsi ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Bangladesh, dan Malaysia.  
Sanksi Internasional, Banyak negara dan organisasi internasional memberlakukan sanksi terhadap Myanmar, khususnya setelah kudeta 2021 dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya.  
Konflik di Myanmar adalah isu yang sangat kompleks dengan banyak aktor dan faktor yang terlibat. Usaha perdamaian dan penyelesaian konflik sering kali menghadapi tantangan besar karena ketidakpercayaan dan kepentingan yang berbeda dari berbagai pihak yang terlibat.

#### **6. Dampak Konflik Agama Buddha dan Islam di Myanmar:**

Dampak konflik antara agama Buddha dan Islam di Myanmar sangat luas dan kompleks.

- A. Pengungsi:** Konflik ini telah menyebabkan puluhan ribu orang Rohingya menjadi pengungsi dan tinggal di tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah, menghadapi kondisi yang sulit dan tidak aman.
- B. Keterlibatan Internasional:** Konflik ini telah menarik perhatian dunia, dengan organisasi internasional seperti PBB mengkritik pemerintah Myanmar atas kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya.
- C. Dampak Ekonomi:** Konflik ini telah mempengaruhi ekonomi Myanmar, terutama di wilayah Rakhine, di mana pengungsi dan korban konflik mengalami kesulitan mendapatkan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan.
- D. Dampak Sosial Budaya:** Konflik ini telah mempengaruhi aspek sosial budaya Myanmar, khususnya di wilayah Rakhine, di mana perbedaan agama dan etnis memengaruhi pemahaman dan penerapan ajaran agama serta pandangan terhadap konflik doktrin.
- E. Dampak Politik:** Konflik ini telah mempengaruhi politik Myanmar, terutama di wilayah Rakhine. Etnis Rohingya telah menuntut kemerdekaan atas Rakhine, mempengaruhi kebijakan pemerintah Myanmar (Sholeh 2018).

## **7. Pandangan Mengenai Konflik atau cara memandang konflik.**

- a. Pemerintah Myanmar: Pemerintah Myanmar menganggap konflik ini sebagai konflik keagamaan dan mengklaim bahwa konflik ini disebabkan oleh perbedaan pendapat individu atau kelompok yang memicu terjadinya konflik.
- b. Etnis Rohingya: Etnis Rohingya menuntut kemerdekaan atas Rakhine dan mengklaim bahwa konflik ini disebabkan oleh diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami dari pemerintah Myanmar.
- c. Organisasi Internasional: Organisasi internasional seperti PBB mengkritik pemerintah Myanmar atas kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya, serta menuntut penghentian kekerasan dan perbaikan situasi kemanusiaan.

Secara keseluruhan, konflik antara agama Buddha dan Islam di Myanmar berdampak luas dan kompleks, memengaruhi pengungsi, keterlibatan internasional, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pemerintah Myanmar, etnis Rohingya, dan organisasi internasional memiliki pandangan yang berbeda tentang konflik ini. Pemerintah Myanmar menganggap konflik ini sebagai hasil perbedaan pendapat, sementara etnis Rohingya melihatnya sebagai akibat dari diskriminasi dan kekerasan, dan organisasi internasional menyerukan penghentian kekerasan dan perbaikan kondisi kemanusiaan (Yatno and Wardani 2018).

## **8. Konflik doktrin dari kedua agama dan titik simbol dari konflik.**

Dalam konteks konflik antara Islam dan Buddha di Myanmar, konflik doktrin dapat dipahami sebagai hasil dari perbedaan interpretasi ajaran agama. Islam mengajarkan inklusivitas dan toleransi terhadap agama lain, namun juga memiliki aspek eksklusif yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan ajaran agama (Fitriani, Harahap, and Utami 2020). Di sisi lain agama Buddha di Myanmar cenderung memiliki doktrin yang lebih eksklusif, yang juga mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan ajaran agama mereka. Aspek-aspek simbolis dari konflik antara Islam dan Buddha di Myanmar mencakup:

- a. Perbedaan Doktrin: Perbedaan doktrin antara Islam dan Buddha di Myanmar mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan ajaran agama mereka. Islam memiliki elemen inklusif dan toleran, tetapi juga aspek eksklusif yang berdampak pada pemahaman dan penerapan ajaran agama. Agama Buddha di Myanmar, sebaliknya, memiliki doktrin yang lebih eksklusif, mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan ajaran agama.
- b. Perbedaan Etnis: Etnisitas juga memainkan peran dalam konflik ini. Muslim Rohingya memiliki identitas etnis yang berbeda dari mayoritas penduduk Myanmar yang beragama Buddha. Perbedaan ini mempengaruhi pemahaman dan penerapan ajaran agama, serta pandangan masyarakat terhadap konflik doktrin.
- c. Perbedaan Politik: Aspek politik turut mempengaruhi konflik ini. Etnis Rohingya menuntut kemerdekaan atas Rakhine, yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Myanmar dan cara mereka memahami serta menerapkan kebijakan tersebut.

## **9. Konflik antar Agama mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat**

Secara keseluruhan, konflik antara Islam dan Buddha di Myanmar berdampak luas dan kompleks terhadap masyarakat. Konflik ini mempengaruhi pengungsi, menarik perhatian internasional, serta mempengaruhi ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pemerintah Myanmar, etnis Rohingya, dan organisasi internasional memiliki pandangan yang berbeda tentang konflik ini. Pemerintah Myanmar mengklaim bahwa konflik ini disebabkan oleh perbedaan pendapat individu atau kelompok, sedangkan etnis Rohingya menuntut kemerdekaan atas Rakhine dan mengklaim bahwa konflik ini disebabkan oleh diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka oleh pemerintah Myanmar (Muarif 2015).

Konflik antara agama Islam dan Buddha di Myanmar memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Rohingya. Kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh Rohingya, yang mayoritas beragama Islam, telah menyebabkan puluhan ribu dari mereka menjadi pengungsi dan meninggalkan rumah mereka. Keadaan ini berdampak langsung pada akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Konflik ini juga mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat Rohingya, dengan banyak dari mereka mengalami trauma dan stres akibat kekerasan dan diskriminasi. Dampak psikologis ini mempengaruhi kehidupan mereka secara luas, termasuk hubungan antar anggota keluarga dan komunitas.

Konflik ini berdampak pada ekonomi masyarakat Rohingya, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan sumber daya. Kehilangan ini berpengaruh luas terhadap akses mereka ke pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Secara keseluruhan, konflik antara Islam dan Buddha di Myanmar secara signifikan mempengaruhi kehidupan masyarakat Rohingya, menyebabkan trauma, stres, dan kehilangan sumber daya akibat kekerasan dan diskriminasi (Sholeh 2018).

### **Kesimpulan**

Konflik antara agama Buddha dan Islam di Myanmar dapat dipahami sebagai akibat dari perbedaan dalam doktrin dan interpretasi ajaran agama masing-masing. Konflik ini telah mengakibatkan kekerasan dan diskriminasi terhadap komunitas Rohingya, yang mayoritas beragama Islam. Akibat dari kekerasan ini, puluhan ribu warga Rohingya menjadi pengungsi dan terpaksa meninggalkan rumah mereka. Situasi ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Rohingya, termasuk akses mereka ke pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan yang layak.

Konflik etno-religius di Myanmar, khususnya kekerasan dan penguasaan masal terhadap komunitas Rohingya, mencerminkan masalah kompleks yang melibatkan identitas etnis, agama, dan politik. Kekerasan yang dialami oleh komunitas Rohingya adalah hasil dari diskriminasi struktural yang melibatkan tindakan militer dan kebijakan negara yang membatasi hak-hak dasar mereka. Peristiwa ini menyoroti pentingnya upaya internasional dalam mencari solusi yang adil dan manusiawi, serta perlunya

reformasi dalam kebijakan domestik Myanmar untuk mengakhiri kekerasan dan pengusiran terhadap kelompok minoritas ini.

- Solusi Terhadap Konflik etno-religius di Myanmar.

Solusi untuk konflik etno-religius di Myanmar memerlukan pendekatan multi-dimensi yang mencakup reformasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, rekonsiliasi dan dialog antar komunitas, bantuan kemanusiaan, kerjasama internasional, pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta penegakan hukum internasional. Hanya melalui upaya yang komprehensif dan kolaboratif, perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan dapat dicapai bagi komunitas Rohingya dan seluruh masyarakat Myanmar.

### Daftar Pustaka

- Adnan, G. 2020. *Sosiologi Agama: Memahami Teori Dan Pendekatan*. Banda Aceh: Ar-raniry Press.
- Bagensa, J. I. 2021. "Menelaah Perang Baru Di Asia Tenggara Berdasarkan Studi Kasus Konflik Rohingya." *Jurnal Asia Pacific Studies*.
- Fitriani, Harahap, and Utami. 2020. "Membangun Relasi Umat Beragama Pasca Konflik Agama Di Tanjungbalai." *Studia Sosia Religia*.
- Lukum, R. 2021. "Membangun Keharmonisan Antar Etnis Lokal Gorontalo Dengan Etnis Bali Dalam Mewujudkan Negara Multikulturalisme Di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Gorontalo." *Journal of Government and Political Studies*.
- Muarif. 2015. "Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Raharjo. 2015. "Peran Identitas Agama Dalam Konflik Di Rakhine Myanmar Tahun 2012–2013." *Jurnal Kajian Wilayah*.
- Sholeh. 2018. "Pandangan Walubi Terhadap Konflik Rohingya Di Myanmar." UIN Syarif Hidayatullah.
- Sodiqin, A. 2016. "Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik Dan Dinamikanya)." *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*.
- Yatno, and Wardani. 2018. "STRATEGI TOKOH AGAMA BUDDHA DALAM MENYIKAPI PASCA KONFLIK ROHINGYA (STUDI KASUS DI KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG)." *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*.